BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara Hukum dan oleh sebab itu maka segala sesuatu yang menyangkut peraturan dan penegakan Hukum harus tegas dan jelas dalam menjalankan dan menerapkannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 mengenai Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.¹ Dan Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Departement Store, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pusat Perbelanjaan dan pasar Modern banyak yang muncul di berbagai Kota di Indonesia dan menjadi pusat perbelanjaan yang di minati oleh masyarakat. Pasar modern telah mampu menandingi pasar tradisional, yang pada umumnya memiliki kesan kumuh, becek dan kotor. Pasar tradisional perkembangannya tidak cukup signifikan, jika dibandingkan dengan perkembangan pasar modern.

Perbedaan utama dari pasar modern dengan pasar tradisional yaitu penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung pembeli hanya melihat label harga yang tercantum pada barang, yang berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, adalah bahan makanan makanan seperti buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang

¹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 2009, Hal 26

dapat bertahan lama. Kelebihan dari pasar ini adalah barang yang dijual lebih dijamin kesehatannya dan tempat belanja yang nyaman.

Sesuai dengan lokasi studi kasus, tepatnya di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, hingga kini tercatat 126 ritel atau pasar modern yang beroperasi di kota ini. Dari jumlah itu terbagi lagi menjadi 48 Indomaret, 60 Alfamart, 11 *Foodmart* dan sisanya ritel lokal. Mereka menjadi alternatif bagi hampir seluruh warga Kota Banjarmasin dalam berbelanja untuk dapat memenuhi segala keperluan hidup sehari-hari. Maraknya keberadaan toko modern di Kota Banjarmasin mulai berdampak pada perdagangan tradisional di karenakan banyak munculnya toko modern yang ada di dekat pasar tradisional. Tak heran jika ada warga yang berbelanja ke toko modern dan meninggalkan pasar tradisional untuk berbelanja.²

Selain permasalahan tersebut, adapula permasalahan yang muncul terkait jarak yang terlalu dekat antar satu toko modern dengan toko modern yang lain yang kini begitu marak di bangun oleh pengusaha-pengusaha pasar modern tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah di tetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin Melalui Peraturan Daerah. Ada dua Toko Modern yaitu Alfamart dan indomart yang berdiri di Jalan Brigjen Hasan Basri Atau Kayu Tangi Ujung yang jarak antar toko modern tersebut berdiri sekitar 100 meter, dan menimbulkan munculnya lagi toko modern-toko modern dengan jarak yang kurang lebih sama. Dalam hal ini pula bertambahnya keluhan – keluhan dari pedagang pasar tradisional yang berdekatan dengan toko modern yang selama ini telah menghidupi mereka. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan penghentian pemberian izin pembangunan berkelanjutan toko modern tersebut.³ Hal tersebut berdampak signifikan

² Elpianur Achmad, “126 Ritel Modern Kepung Banjarmasin, Pasar Tradisional Kian Terhimpit” (online), <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/06/07/126-ritel-modern-kepung-banjarmasin-pasar-tradisional-kian-terhimpit>(Selasa, 29 Agustus 2016)

³ Sutrisno, “Delapan Toko Modern di Banjarmasin Ternyata Ilegal” (online) <http://kalsel.prokal.co/read/news/1373-delapan-toko-modern-di-martapura-ini-ternyata-ilegal> (Kamis, 18 September 2016)

terhadap perkembangan ekonomi pasar-pasar yang ada di dekatnya baik toko modern lokal maupun pasar tradisional dan juga estetika keindahan Kota Banjarmasin sebagai hunian yang nyaman.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan daerah (PERDA) No 20 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut telah menjelaskan mengenai aturan-aturan terkait pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mengacu pada Rencan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin, Rencana Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan *Zonasi*.

Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai tata aturan pembangunan dalam pendirian Pusat-pusat Perbelanjaan dan Toko-toko Modern.⁴Aturan-aturan tersebut secara tegas dan jelas tertuang pada Bab II bagian Ke-dua Pasal 5 Ayat (5) PERDA No 20 Tahun 2012. Yang berisi sebagai berikut:

“Disetiap lingkungan pemukiman atau kawasan perumahan hanya boleh ada 2 (dua) Minimarket dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter).”

Dalam penyelenggaraannya pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 pada Pembinaan dan Pengawasan bahwa lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab pengawasan serta penanganan terhadap segala hal adalah Pemerintah Kota Banjarmasin, namun dalam penyelenggaraan di lapangan pemerintah kota Banjarmasin biasanya menyerahkan kewenangan akan pengawasan dan pembinaan tersebut kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin yang memang di bentuk oleh pemerintah kota Banjarmasin untuk mengurus mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut kendati demikian, untuk hal hal yang mendasar seperti pemberian izin dan

⁴ Ibid

pemberian sanksi, adalah mutlak kewenangan pemerintah kota yang telah memperoleh laporan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan.⁵

Dari segala pemaparan yang peneliti tulis di atas maka saya selaku peneliti ingin menganalisis mengenai Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 yang secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Pihak yang berhak untuk melakukan tindakan Pembinaan dan Pengawasan terkait pasar-pasar yang ada di Banjarmasin di karenakan begitu pentingnya hal tersebut dapat terlaksana dengan seharusnya guna keindahan tata Kota Banjarmasin, standar Kota Banjarmasin, kemajuan perekonomian, dan kualitas huni kota yang akan menjadi dampak apabila Peraturan daerah tersebut tidak berjalan seharusnya. Atas dasar segalanya itu maka saya selaku peneliti mengangkat judul **“Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin)”** untuk judul skripsi saya sebagai tugas akhir guna menyelesaikan Studi S-1 saya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Peneliti memilih lebih memfokuskan pembahasan dengan hanya mengangkat PERDA No 20 Tahun 2012 Bagian Ke-dua Pasal 5 mengenai Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian yang peneliti lakukan adalah asli dan bukan hasil plagiasi, maka akan dilakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Perbandingan tersebut akan peneliti jelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

⁵ Salman Hadi, “Pengelolaan Pasar Tradisional” (online), <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/06/07/126-ritel-modern-kepung-banjarmasin-pasar-tradisional-kian-terhimpit>, (Sabtu, 29 Agustus 2016)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan	Pembeda
1.	Elok Rahmawati	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait implementasi peraturan daerah kabupaten jombang nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.	Penelitian yang dilakukan oleh Elok Rahmawati fokus pada penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Jombang

Dalam skripsi ini peneliti memilih Kota Banjarmasin sebagai lokasi studi kasus, dan memfokuskan pembahasan pada jarak antar toko modern berdasarkan aturan PERDA No 20 Tahun 2012 Bagian Ke-dua pasal 5 di karenakan Kota Banjarmasin adalah Kota kelahiran peneliti dan serta keinginan yang besar dari peneliti untuk dapat mengenalkan Kota Banjarmasin melalui skripsi peneliti dan memfokuskannya kepada permasalahan jarak antar Toko Modern di karenakan hal tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?
2. Apa hambatan dan upaya dalam Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penegakan Hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin terkait Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 20 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (5) mengenai Pusat Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi yang di alami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dalam penegakan aturan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (5) mengenai Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan bermanfaat pada bidang keilmuan khususnya dalam ilmu Hukum Administrasi Negara dalam hal ini terkait pada bidang pemerintahan mengenai upaya pemerintahan terkait penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat, khususnya kepada pelaku pelaku pengusaha yang membuka pusat perbelanjaan dan toko modern.

b. Bagi Kalangan Akademis (Mahasiswa)

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang keilmuan hukum administrasi negara dan dapat berguna sebagai bahan kajian serta penelitian hukum yang terkait dengan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.

c. Bagi Peraktis Hukum

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dalam memberi masukan serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan upaya pemerintahan terhadap penegakan aturan-aturan sesuai dengan kajian hukum administrasi negara.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan sekaligus evaluasi bagi penegak hukum khususnya pihak pemerintah terkait dalam melakukan proses upaya dan pengawasan penegakan hukum sesuai dengan aturan-aturan dalam

penataan pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga penegakan hukum di kota banjarmasin dapat berjalan maksimal sesuai dengan seharusnya guna kenyamanan bagi masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu tata penelitian yang benar. Adapun tata penelitian dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dirinci dalam bab-bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka dalam Bab ini berisikan mengenai berbagai teori-teori dan konsep dasar yang berkenaan dengan Peranan Pemerintah Terhadap Penegakah Hukum Terkait Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Kajian Umum Kewenangan
- b. Kajian Umum Penegakan Hukum
- c. Kajian Umum Peraturan Nomor 20 Tahun 2012
- d. Kajian Umum Pasar Tradisional
- e. Kajian Umum Pusat Perbelanjaan
- f. Kajian Umum Toko Modern

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin yang terkait, Pembahasan mengenai apa dan bagaimanakah Peranan Pemerintah dalam upaya penegakan hukum atas izin pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern, apa sajakah hambatan dan solusi yang di hadapi oleh pihak pemerintah selaku pengawas dan penindak akan tindakan menyimpang mengenai pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.